

111 Tanah Pemkot Tak Bersertifikat

Singkawang. Dari 154 bidang tanah dengan luas sekitar 1,8 juta meter persegi yang dibeli Pemerintah Kota (Pemkot) Singkawang sejak 2002 hingga 2010 dengan harga Rp 26 miliar, terdapat 111 bidang tanah yang tidak bersertifikat.

"Dari 154 bidang tanah itu, hanya enam bidang yang mempunyai sertifikat dan 37 bidang tanah yang masih dapat proses pembuatan sertifikat kepemilikan, sisanya 111 bidang belum diproses pengurusan sertifikat kepemilikannya," ungkap Paryanto, Juru Bicara Fraksi Amanat Kebangkitan Sejahtera Daerah (Akesda) DPRD Kota Singkawang dalam Paripurna Pendapat Umum (PU) Fraksi-fraksi DPRD Kota Singkawang terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Pelaksanaan APBD 2010, kemarin (20/7).

Kondisi tersebut kata Paryanto, diperparah lagi dengan adanya perbedaan antara sertifikat dengan Daftar Hasil Pengadaan Tanah. "Pemkot Singkawang sepertinya tidak peduli dalam pengamanan aset daerah, khususnya aset tanah ini," ujarnya.

Paryanto mengatakan, apabila hal ini dibiarkan begitu saja, maka

tanah yang telah dibeli Pemkot Singkawang menjadi rawan untuk diklaim pihak lain. "Akhirnya dapat merugikan keuangan daerah," ingatnya.

Menurut dia, pengamanan aset tetap seperti pensertifikatan tanah milik Pemkot Singkawang ini, bisa dijadikan salah satu indikator kinerja Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait. "Artinya apabila dalam program kerjanya kepala SKPD, katakanlah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) tidak mampu melakukan pensertifikatan dan pengamanan aset daerah, maka dalam jangka waktu tertentu, katakanlah setiap tahun, dapat diberikan punishment (sanksi, red). Tetapi sebaliknya, jika berhasil maka diberikan reward (penghargaan, red)," papar Paryanto.

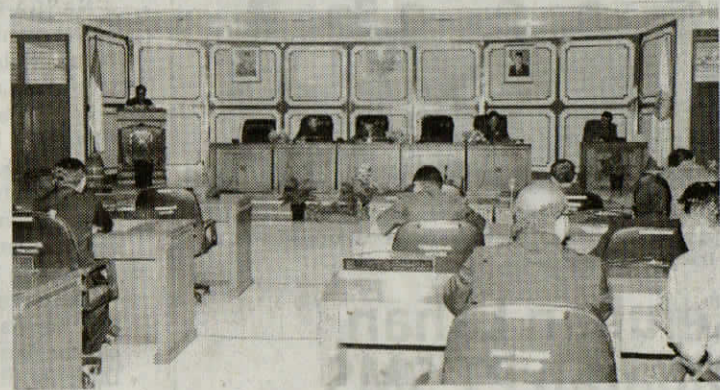
Sekretaris Fraksi Akesda DPRD Kota Singkawang ini lebih menyoloroti permasalahan pada pengelolaan aset daerah, karena masalah ini menjadikan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI hanya memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) terhadap Pelaksanaan APBD 2010. "Pemkot Singkawang masih lemah dalam hal pengelo-

laan aset daerah," tegas Paryanto. Permasalahan aset tanah yang tidak bersertifikat ini diungkapkan Paryanto, hanya salah satu dari sekian banyak aset daerah, seperti gedung dan lainnya. Termasuk diantaranya aset yang diserahkan kabupaten induk.

Terpisah, Ketua DPRD Kota Singkawang Thjai Chui Mie mengatakan, kalau pengelolaan aset daerah menjadi penyebab pelaksanaan APBD Kota Singkawang pada tahun lalu mendapatkan opini WDP dari BPK-RI. "Saya sudah menyurati DPPKAD sekitar tiga bulan lalu untuk meminta daftar aset yang sudah diserahkan kabupaten induk. Saya ingin mendapatkan daftar itu secara mendetail, agar Dewan juga bisa membahasnya untuk mendapatkan solusi penyelesaiannya," kata Thjai Chui Mie.

Sampai saat ini, Thjai Chui Mie mengaku belum mendapatkan balasan surat dari instansi yang menangani pengelolaan aset Pemkot Singkawang tersebut. "Belum ada tanggapan, kita masih menunggu," ujarnya.

Thjai Chui Mie mengharapkan, permasalahan pengelolaan aset daerah ini dapat segera diselesaikan. "Kita juga harus aktif mencari solusi



Fraksi-fraksi DPRD Kota Singkawang menyampaikan pandangan umum terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Pelaksanaan APBD 2010. Mordiladi

penyelesaian masalah aset daerah iri. Kita harus mengetahui kendala-kendalanya, agar dewan juga bisa membantu mencari solusinya," ujarnya.

Sebelumnya, Walikota Singkawang Dr Kanjeng Raden Aryo (KRA) Hasan Karman Notohadiningrat mengungkapkan, Opini WDP yang diberikan BPK-RI tersebut, karena adanya akumulasi terkait permasalahan aset. "Sudah kita upayakan agar selesai," katanya.

Permasalahan itu kata Hasan, menyangkut aset dari kabupaten induk

yang kadang-kadang macet. "Mungkin dikarenakan sudah terlalu lama, sehingga ada yang sudah ditukar gulung (ruislag) ke pihak-pihak tertentu, ini bagaimana menyelesaikannya," ucapnya.

Karena permasalahan ini melibatkan antarkabupaten/kota, Hasan sudah menyampaikannya ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar untuk memediasi penyelesaiannya. "Kita masih menunggu tanggapan, karena itu bukan wewenang kita lagi," pungkasnya. (dik)